

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang biasanya digunakan oleh lembaga publik atau pemerintah. Hampir setiap lembaga publik dituntut untuk mengelola laporan keuangan secara transparan. Maka dari itu akuntansi pada sektor publik ini sering digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis dan pelaporan pengelolaan keuangan dan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja laporan pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik dituntut untuk melakukan pengelolaan biaya sosial dan ekonomi yang lebih efisien. Apabila tuntutan lembaga publik mengenai pertanggungjawaban publik lebih menguat, maka akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan sebagai bentuk transparansi kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik.

Pada akuntansi sektor publik ini sangat berkaitan erat perihal pertanggungjawaban atas sumber dana yang digunakan. Oleh karena itu, pada

bidang ini tentunya membutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi kompetensi, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

2.1.1.1 Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

2.1.1.2 Elemen – Elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian – bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik.

a. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1). Proses perencanaan yang dilaksanakan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan

diterimanya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis.

b. Penganggaran Publik

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran.

Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor, sebagai berikut:

1. kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi,
2. ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga dan
3. akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas prakiraan anggaran.

c. Realisasi Anggaran Publik

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Artinya, fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses –

proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan dan penyelesaian.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan sebagai berikut:

a. Neraca

Bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu asset, liabilitas, dan ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Catatan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, profit, serta kerugian bersih suatu usaha dalam kurun waktu tertentu.

c. Laporan Perubahan Modal

Salah satu bentuk laporan keuangan yang menunjukkan adanya perubahan modal suatu perusahaan akibat dari beberapa alasan terkait usaha, dan biasanya berlaku untuk periode tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan.

e. Laporan Keuangan

Catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.

f. laporan tahunan

merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun.

a. Audit Sektor Publik

Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, BUMN, instansi pengelola aset negara lainnya, atau organisasi publik non pemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan dan organisasi di tempat peribadatan. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur

tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas, memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting. Agar pemeriksaan lebih efisien, efektif dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor.

b. **Pertanggungjawaban Publik**

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

1.1.1.3 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Secara praktik, definisi Akuntansi sektor publik di Indonesia adalah yang menggunakan dana masyarakat. Seperti yang telah di ungkap di awal, di Indonesia, jenis Akuntansi sektor publik yang dikenal, antara lain:

1. **Akuntansi Pemerintah Pusat**

Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

3. Akuntansi Partai Politik

Setiap organisasi yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.

4. Akuntansi LSM (lembaga Swadaya Masyarakat)

Sebagai sarana informasi mengenai penggunaan serta pengelolaan sumber daya bagi lembaga pemberi dana maupun public.

5. Akuntansi Yayasan

Badan hukum yang kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan.

6. Akuntansi Pendidikan

Sesuatu yang dilakukan pengelola pendidikan baik itu di tingkat daerah maupun pusat dalam proses penetapan kebijakan pendidikan sehingga terciptanya pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel, tepat guna, transparan.

7. Akuntansi Kesehatan

Merupakan suatu bidang studi akuntansi yang mengupas pengelolaan organisasi kesehatan bidang studi ini tentunya tidak dapat dilepas begitu saja dari bidang akuntansi lainnya.

8. Akuntansi tempat Peribadatan

Suatu cara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Putri (2021) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumber ekonomi daerah asalnya, sehingga diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi yang baik di daerahnya sendiri untuk meningkatkan penerimaan.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah sumbangan yang dilakukan oleh seseorang atau badan kepada daerah tanpa kompensasi langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Tatiana & Noch, 2016).

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun (2009), retribusi daerah adalah pungutan daerah yang mengacu pada pembayaran biaya jasa dan izin pemerintah daerah tertentu khusus untuk kepentingan perseorangan atau badan. Retribusi ini dibedakan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup (Indra Bastian, 2006 : 148):

- 1.) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- 2.) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 3.) Bagian laba atas penyertaan modal oleh perusahaan milik pemerintahan/BUMN

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk di dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan, dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup (Indra Bastian, 2006:148):

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah oleh mata uang asing
- 7) pendapatan denda pajak
- 8) pendapatan denda retribusi
- 9) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 10) pendapatan dari pengembalian

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Futri (2021) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dan menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Belanja modal adalah angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Dalam menambah aset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa belanja modal.

2.1.3.2 Jenis- jenis Belanja Modal

1. Belanja Tanah

Belanja tanah dalam pengeluarannya atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian dan pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatandan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

1 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian, peningkatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3 Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan dan pembuatan

serta perawatan terhadap aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

2.1.3.3. Hubungan PAD terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan yang nantinya akan masuk ke kas daerah, yang diperoleh dari pajak daerah yang berada di daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal. Jika belanja modal meningkat akan berdampak baik pada peningkatan pembangunan dan mutu pelayanan masyarakat. Jika asset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat, dapat digunakan sebagai investasi untuk sumber dana dan belanja modal selanjutnya, dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Begitupun sebaliknya apabila pendapatan asli daerah menurun maka semakin menurun pula belanja modal sehingga akan berdampak buruk pada peningkatan pembangunan dan mutu pelayanan masyarakat.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatnya dalam sektor belanja modal yang bertujuan untuk menambah asset bagi pemerintah daerah serta meningkatkan taraf pelayanan kepada publik. Jika keuangan pemerintah daerah dilihat atas dasar kemampuan dan kelemahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Pemerintah Daerah di

Indonesia(PEMDA) harus mempunyai sumber pendapatan yang memadai sebagai salah satu wujud meningkatkan pembangunan dan belanja modal.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi	Pendapatan asli daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3) Belanja Modal (Y), Regresi linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal	Persamaan berada di alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Perbedaan berada di Variabel penelitian
2	Rohardian & Jaeni (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Pendapatan asli daerah (X1) Dana perimbangan (X2) Belanja Modal (Y) Regresi linier Berganda Hasil penelitian ini	Persamaan berada di alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Perbedaan berada di Variabel penelitian

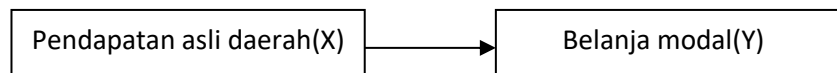
		Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa	menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal		
3	Futri (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi	Pendapatan asli daerah (X1) Dana alokasi umum (X2) Belanja modal (Y) Regresi linier Berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Persamaan berada di alat analisis yaitu menggunakan regresi linier berganda	Perbedaan berada di Variabel penelitian
4	Fernandes & Oktavia (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap	Pendapatan asli daerah (X1) Dana alokasi umum (X2) Belanja modal (Y) Regresi linier berganda Hasil penelitian ini	Persamaan berada di alat analisis yaitu menggunakan regresi linier berganda	Perbedaan berada di Variabel penelitian

		Belanja Modal Pada 19 Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat	menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.		
5	Setyarni & Rustiyaningih (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi dan Dana Bagi Hasil Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	<p>Pendapatan asli daerah (X1) Dana alokasi umum (X2) Dana alokasi khusus (X3) Dana bagi hasil (X4) Belanja modal (Y)</p> <p>Regresi linier berganda</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.</p>	Persamaan berada di alat analisis menggunakan regresi linier berganda	Perbedaan berada di Variabel penelitian

(Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan model kerangka pemikiran pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel independent (bebas) dengan variabel dependent (terikat), dimana menjadi variabel independent (bebas) adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan yang menjadi variabel dependent (Terikat) adalah Belanja Modal (Y). kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu pemikiran bagan yang tersaji pada gambar berikut ini



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus di uji atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka (Martono,2011:171). Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten OKU tahun 2008-2022.